

RENCANA KERJA TAHUN 2019



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKABUMI**

JL.BHAYANGKARA KM.1 PALABUHANRATU - KABUPATEN SUKABUMI



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019.

Rencana Kerja DPMD Tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Strategis DPMD Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan DPMD untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Akhirnya atas nama lembaga, kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja pegawai DPMD dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Palabuhanratu, 30 Juli 2018

Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi

ADE SETIAWAN, SIP
NIP. 19630603 198503 1 021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 dan Capaian Renstra DPMD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD	15
2.2.1 Tugas Pokok	15
2.2.2 Fungsi	15
2.2.3 Susunan Organisasi	39
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ...	49



BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	50
3.2.1 Tujuan Renja DPMD	51
3.2.2 Sasaran Renja DPMD	52
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Sukabumi	39
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Triwulan II
- Tabel 2.2 Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
- Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan DPMD Kabupaten Sukabumi untuk Tahun 2019, yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukabumi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA DPMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten sukabumi.

Penyusunan RENJA DPMD Kabupaten Sukabumi berdasar pada hakekat Otonomi Daerah sebagaimana di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Berkaitan dengan itu dalam melaksanakan pembangunan nasional pada hakekatnya mengandung makna beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja tetapi juga batiniah, secara selaras, serasi dan seimbang.
- Bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air.
- Bahwa pembangunan itu bukan hanya sebagian masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemajuan lahiriah dan batiniah dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan individu, keluarga dan masyarakat akan tercipta kondisi social masyarakat yang sehat dan dinamis. Pembangunan dalam Pemberdayaan Merupakan bagian integral



dari pembangunan nasional, sehingga masyarakat dalam proses pembangunan berperan serta aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi dan Berdasarkan Peraturan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Memasuki Tahun 2019 terjadi perubahan mendasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya dengan disahkannya beberapa peraturan perundang undangan diantaranya :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2019 merencanakan beberapa agenda kegiatan dalam upaya mendukung lahirnya beberapa regulasi tentang desa.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45).
16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 58).
17. Perbup Nomor 38 tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi ini yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana teknis DPMD Kabupaten Sukabumi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta memberi arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya;



2. Sebagai pedoman/acuan bagi seluruh Bidang di DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tugas pokok dan fungsi dengan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi ini yaitu sebagai berikut :

1. Tersusunnya Rencana Kerja yang komprehensif yang berorientasi kepada pelayanan secara terukur;
2. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan antar bidang di DPMD Kabupaten Sukabumi;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pemberdayaan masyarakat;
4. Mewujudkan Instansi yang Akuntabel, Partisipatif, Bermanfaat, Tepat Sasaran dan Berkesinambungan; dan Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika

Sistematika RENJA DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Kerangka Pikir Rencana Kerja Tahun 2019, Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan



yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten / Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 dan Capaian Renstra DPMD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan.

Dalam penyusunan Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Triwulan II dapat terealisasi 42,35% hal ini dapat dilihat dalam **Tabel 2.1** dibawah ini



**Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 Triwulan II**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan (Rp.)			Ket
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		desa	5	5		403.405.000	36.425000	9,03	Trw 2
		klpk	2	2					
Bimbingan Teknis Perempuan Di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah peserta Bimtek Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha ekonomi Produktif	Orang/ Hari	60 /2	0	0	68.160.000	0	0	Trw 2
Bimbingan Teknis Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah peserta Bimtek Manajemen Bumdes; terciptanya tertib administrasi pengelola Bumdes;	orang	55	0	0	64.880.000	0	0	Trw 2
Pembentukan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Jumlah Posyantek sebagai pusat informasi TTG bagi masyarakat pedesaan; terlaksananya diseminasi Posyantek TK Kabupaten; terlaksananya pembinaan/monitoring Posyantek; 4 Kec, /2 Posyantek, 25 orang/2 Kegiatan, 4 Kec/2 Posyantek	org/keg/kec/posyantek	94 Org/1 Keg, 4 Kec/4 posyantek	1kec/1 posyantek	25	134.345.000	36.425000	27,11	Trw 2
Penguatan Perekonomian Mikro Pedesaan	Jumlah peserta workshop penguatan perekonomian Mikro pedesaan; tersusunnya draft peraturan Bupati tentang indikator penilaian Bumdes;	Dok Peraturan Bupati/ Paket Aplikasi Sistem Pelaporan BUMDes	1 Dok Peraturan Bupati, 1 Paket Aplikasi Sistem Pelaporan BUMDes	0	0	70.520.000	0	0	Trw 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	Jumlah peserta focus group discussion peningkatan kemitraan swasta dan UMKM di Pedesaan	orang	60	0	0	35.300.000	0	0	Trw 2
Dukungan Manajemen Kerjasama Antar Desa	Jumlah peserta Workshop kerjasama antara desa dalam perencanaan pengembangan kawasan pedesaan	orang	30	0	0	30.200.000	0	0	Trw 2
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		orang	200	200	100	933.979.500	573.929.000	61,45	Trw 2
		Desa	5	5	100				
Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta Bimtek administrasi Desa, 75 Orang	orang	75	75	100	87.840.000	87.400.000	99,50	Trw 2
Lomba Desa	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Lomba Desa	Desa	381			112.903.500	94.606.000	83,35	Trw 2
Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Peserta Perangkat Desa yang dilatih penyusunan RKP Desa Online	orang	40	40	100	33.980.000	33.705.000	99,19	Trw 2
Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Bimtek pendayagunaan profil Desa	orang	70	70	100	80.260.000	79.860.000	99,50	Trw 2
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun; Jumlah peserta yang mengikuti Lokalkarya	Dok/orang	1Dokumen,14 1 Orang	0	0	66.150.000	0	0	Trw 2
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Perangkat Desa yang dilatih penatausahaan Keuangan Desa	orang	50	50	100	69.900.000	67.910.000	97,15	Trw 3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dukungan Manajemen Bale Sawala Sistem Keuangan Desa (DBH Pajak Rokok 2017)	Rekonsiliasi anggaran Desa	Kali/desa	3/381	0	0	40.920.000	13.650.000	33,36	Trw 2
Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa	Jumlah Peserta Diseminasi Penyusunan Laporan APBDesa dan deminasi pendamping Desa	Orang/Kacamata n	130 Orang, 130 kec	0	0	64.650.000	0	0	Trw 2
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Peserta Bimtek Verifikator Kecamatan, Monitoring dan Evaluasi APB Desa	Orang/Kecamata n	94/47	0	0	174.894.000	12.290.000	7,03	Trw 2
Bimbingan Teknis Perencanaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah perangkat Desa yang dilatih penyusunan APB Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	orang	60	0	0	80.650.000	0	0	Trw 2
Bimbingan Teknis BPD	Jumlah peserta Bimtek BPD	orang	70	70	100	85.740.000	85.300.000	99,49	Trw 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah revisi Perda tentang Desa, 381 Desa di 47 Kecamatan	perda/desa	1 perda/381 desa	1 perda/381 desa	100	36.092.000	34.558.000	95,75	Trw 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		desa	2	2	100	3.764.549.500	1.406.305.800	37,36	Trw 2
		orang	100	100	100				
		klpk	5	5	100				
Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal	Jumlah Peserta diseminasi pemberdayaan desa-desa tertinggal, Monev Desa-Desa Tertinggal	Orang,Desa, Keg, Kec	15 Orang/9 Desa/2Keg,5Kec/9 Desa	15 Orang/9 Desa/2Keg,5Kec/9 Desa	90	140.072.000	127.596.500	91,09	Trw 2
Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Orang,Kec, Angkatan	188 Orang/47 Kec/2 Angkatan	188 Orang/47 Kec/2 Angkatan	100	148.122.000	147.382.000	99,50	Trw 2
Penguatan Pokjanal Posyandu	Rapat Koordinasi Pokjanal posyandu, pemuhtahiran serta posyandu berbasis online, binaan posyandu TK. Kabupaten, Bupati Award Tk. profinsi, Finalisasi/Rechecking posyandu Tk. Profinsi, Lomba Posyandu Tk. Profinsi, Binaan P2WKSS Binaan 10 Program PKK & KB-KES	Orang, Hari, Kali, Kec,	90 Orang/1 Hari, 94 Orang/1 Hari, 25 Orang/2 Kali/4 Kec, 40 Orang/1 Hari, 150 Orang/1 Hari/2Kali, 10 Orang/2 Hari, 25 Orang, 2 Hari/25/ Orang/2 Hari	90 Orang/1 Hari, 94 Orang/1 Hari, 25 Orang/2 Kali/4 Kec, 40 Orang/1 Hari, 150 Orang	50	177.960.000	92.150.900	51,78	Trw 2
Peningkatan Keberdayaan Desa-desa Perbatasan	Jumlah Peserta Diseminasi Peningkatan Desa-Desa Perbatasan	Desa, Hari	40 Desa/2 Hari	0	0	45.100.000	0	0	Trw 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Rancangan Perbup Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	jumlah rancangan perbup yang di susun ;jumlah peserta yang mengikuti diseminasi	perbup/orang	1/381	1/381	100	241.297.000	174.558.200	72,34	Trw 2
Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS	Jumlah Peserta Diseminasi TMMD Tk.Kab & Diseminasi TMMD Tk. Desa Diseminasi BSMSS Tk.Kab & Diseminasi BSMSS Tk. Desa,Bimtek Desa Membangun,Pisik TMMD,Pisik BSMSS, Diseminasi PPBN,Diseminasi Bahaya Narkoba, Diseminasi Kamtibmas,Diseminasi PHBS BSMSS, 3 Desa di 3 Kecamatan	Orang,Keg ,Angk,Kec, Desa	30 Orang/2Keg,50 Orang/3Keg,30 Orang/2Keg,50 Orang/3 Keg/94 Orang/2 Angk, 1 Kec/1 Desa,1 Kec/1 Desa,45 Orang/2 Keg,45 Orang/2 Keg/45 Orang/2 Keg,45 Orang/2 Keg	30 Orang/2Keg,50 Orang/3Keg,30 Orang/2Keg,	20	2.350.820.000	568.668.750	24,19	Trw 2
Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Provinsi	Jumlah Peserta Diseminasi Bantuan Keuangan Tk.Kecamatan,Diseminasi Bantuan Keuangan Tk Desa.	Kec/Keg/D esa	47 Kec/2 Keg,381 Desa/2 Keg	0	0	86.920.000	0	0	Trw 2
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah pesesrta diseminasi BBGRM penancangan BBGRM Kabupaten,pencanangan BBGRM provinsi	Kec/PD/D esa/Kel/Or ang/Hari	47 Kecamatan/PD,1 Kecamatan/1 Desa/Kel,6 Orang/3 Hari	47 Kecamatan/PD ,1 Kecamatan/1 Desa/Kel,6 Orang/3 Hari	100	75.000.000	71.678.200	95,57	Trw 2
Penyelenggaraan Pra Musrenbang Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Desiminasi Musrenbang Desa	Desa/Kec	381 Desa di 47 Kacamatan	0	0	230.300.000	0	0	Trw 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat/PAP PNPM GSC	Jumlah Peserta Diseminasi Para Pelaku DSC,Rapat Kerja Kabupaten	Orang,Har i,Keg	77 Orang/1 Hari,10 Orang/11 Keg	0	0	81.793.000	49.361.000	60,35	Trw 2
Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar di Desa	Jumlah Peserta Diseminasi Layanan Sosial Dasar	Desa/Kec amatan	9 Desa di 5 Kecamatan	2 desa,1 Kec	22	72.662.000	21.758.000	29,94	Trw 2
Pengembangan Kawasan Pedesaan	Jumlah Peserta Rakor Kawasan Perdesan,Diseminasi Kawasan Perdesaan,FGD Kawasan Perdesaan	Orang/Kec /Desa/Keg	25 Orang/3 Kec./2 Keg,4 Orang/21 Desa/2 Keg,4 Orang/21 Desa/2 Keg	25 Orang/3 Kec	20	114.503.000	28.985.250	25,31	Trw 2





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

2.2.1 Tugas Pokok

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; perubahan mendasar dalam proses dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatas mengharuskan setiap Lembaga Pemerintah melakukan reorganisasi kelembagaan maupun kegiatannya.

Sejalan dengan itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah melakukan perubahan Organisasi dan penyempurnaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58) disebutkan bahwa tugas pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.2.2 Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor) disebutkan bahwa tugas pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah



di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangandan Aset Desa; pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan penataan Desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
- i. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
- j. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- k. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



2.2.3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan
 1. Seksi Administrasi Desa
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
- d. Bidang Keuangan dan Aset Desa membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa
 2. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa
 3. Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset Desa
- e. Bidang Pembangaunan Sarana dan Prasarana Desa, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar
 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat
 2. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
 3. Seksi Kawasan Pedesaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Tugas dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan
 - d. Pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan Dinas;
 - f. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)Dinas;
 - h. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. Pengkajian dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. Pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - k. Pembinaan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Dinas;
 - l. Penanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;



- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan pengadaan;
 - e. Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, pelengkapan dan kerumahtanggaan;



- f. Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
- h. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- i. Pengelolaan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
 - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas



Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang Perencanaan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;.
 - d. Penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas;
 - h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - j. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya.
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas



Tugas dan Fungsi

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
 - b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan tugas di bidang penataan administrasi desa; bidang peningkatan kapasitas pemerintah desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan administrasi desa; bidang peningkatan kapasitas pemerintah desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - d. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang penataan administrasi desa; bidang peningkatan kapasitas pemerintah desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - e. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang administrasi Desa;
 - f. Penyelenggaraan fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintah Desa;
 - h. Pengkoordinasian penyelesaian sengketa pemerintahan Desa;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;



- I. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Bina Pemberdayaan Pemerintahan Desa membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Administrasi Desa
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
 - c. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

- (1) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di bidang Penataan Administrasi Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Administrasi Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penataan Administrasi Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang penataan administrasi desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang administrasi desa, meliputi: pedoman teknis tata wilayah desa, penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama desa;
 - d. pelaksanaan sosialisasi tata wilayah desa, penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama desa;



- e. pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa, penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama desa;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata wilayah desa, penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama desa;
- g. pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pemerintahan desa;
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi peningkatan kapasitas pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa, meliputi: pedoman teknis peningkatan



sumber daya aparatur pemerintahan desa; pedoman teknis peningkatan kapasitas sumber daya material pemerintahan desa;

- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, meliputi: bimbingan Kepala Desa Pemula dan Ladies Program, bimbingan teknis manajemen pemerintahan desa, bimbingan teknis Badan Permusyawaratan Desa;
- e. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD;
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Evaluasi Perkembangan Desa

- (1) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Administrasi Pemerintahan Desa di bidang Evaluasi Perkembangan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Evaluasi Perkembangan Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang Evaluasi Perkembangan Desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Evaluasi Perkembangan Desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penyusunan profil desa;
 - e. pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa;
 - f. penyiapan bahan pengusulan status/kategori tingkat perkembangan desa;



- g. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa/kelurahan tingkat kabupaten, antara lain melalui perlombaan, pekan inovasi perkembangan desa;
- h. penyusunan bahan untuk penentuan labsite untuk model pengembangan desa;
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas dan Fungsi Bidang Keuangan dan Aset

- (1) Bidang Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang keuangan dan aset desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keuangan dan Aset Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan aset desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan keuangan desa; penatausahaan keuangan dan aset desa; dan monitoring, evaluasi, pertanggungjawaban keuangan desa;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan dan aset desa, dan monitoring, evaluasi, pertanggungjawaban keuangan desa;



- e. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset desa;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Keuangan dan Aset Desa membawahkan :
- a. Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa;
 - b. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset Desa.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa

- (1) Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keuangan dan Aset Desa di bidang perencanaan keuangan dan aset desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan keuangan dan aset desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan keuangan desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan keuangan desa, meliputi: pelaksanaan desk asistensi dan konsultasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan



- regulasi tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan bimbingan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset

- (1) Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keuangan dan Aset Desa di bidang penatausahaan keuangan dan aset desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan keuangan dan aset desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang penatausahaan keuangan dan aset desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan desa;
 - e. pelaksanaan pembinaan penatausahaan aset desa;
 - f. pelaksanaan pemantauan penatausahaan keuangan desa dan aset desa;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;



m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset Desa

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keuangan dan Aset Desa di bidang monitoring dan evaluasi keuangan dan aset desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang Seksi Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang monitoring dan evaluasi keuangan dan aset desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang monitoring dan evaluasi keuangan dan aset desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain;
 - f. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil pengelolaan aset desa;
 - h. pelaksanaan evaluasi hasil pengelolaan sistem informasi keuangan dan aset desa;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;



- I. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas dan Fungsi

Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

- (1) Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi desa, bidang pengembangan pelayanan sosial dasar dan bidang pengembangan infrastruktur masyarakat;
 - c. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan usaha ekonomi desa, bidang pengembangan pelayanan sosial dasar dan bidang pengembangan infrastruktur masyarakat;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;



- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Desa;
 - b. Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar; dan
 - c. Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di bidang pengembangan usaha ekonomi desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan usaha ekonomi desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha ekonomi desa;
 - d. perumusan bahan pedoman teknis pengembangan usaha ekonomi desa;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa dan perdagangan desa;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - g. pelaksanaan pelatihan usaha ekonomi masyarakat;
 - h. fasilitasi akses permodalan usaha ekonomi masyarakat;



- i. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, dan usaha ekonomi masyarakat;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, dan usaha ekonomi masyarakat;
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di bidang Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan pelayanan sosial dasar;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengembangan pelayanan sosial dasar;
 - d. perumusan bahan pedoman teknis pelayanan sosial dasar;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengembangan akses informasi masyarakat yang lebih mudah;
 - g. fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pembinaan pelayanan sosial dasar;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan pelayanan sosial dasar;



- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di bidang pengembangan infrastruktur masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan infrastruktur masyarakat;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur masyarakat;
 - d. merumuskan bahan pedoman teknis pengembangan infrastruktur masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat;
 - f. pelaksanaan percepatan peningkatan status desa-desa tertinggal;
 - g. pelaksanaan kajian pemutakhiran data berdasarkan indeks desa membangun;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan



- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas dan Fungsi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang kelembagaan masyarakat, pendayagunaan teknologi tepat guna dan Kawasan Perdesaan;
 - c. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidangkelembagaan masyarakat; pendayagunaan teknologi tepat guna dan Kawasan Perdesaan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; dan



c. Seksi Kawasan Perdesaan. (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kelembagaan Masyarakat

- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bidang kelembagaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelembagaan masyarakat;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - d. perumusan bahan pedoman teknis kelembagaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan revitalisasi kelembagaan masyarakat dan kelembagaan adat;
 - f. fasilitasi peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis kepada kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. pelaksanaan pembinaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

- (1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - d. pelaksanaan identifikasi potensi lokal desa;
 - e. pelaksanaan pelatihan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - f. fasilitasi pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - g. pelaksanaan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi;
 - h. penyelenggaraangelar teknologi tepat guna;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Kawasan Perdesaan

- (1) Seksi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bidang kawasan perdesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kawasan Perdesaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang kawasan perdesaan;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang kawasan perdesaan;
- d. merumuskan bahan pedoman teknis tentang kawasan perdesaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembangunan ekonomi kawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kawasan;
- h. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kawasan perdesaan;
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kelompok jabatan Fungsional

Pada setiap Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

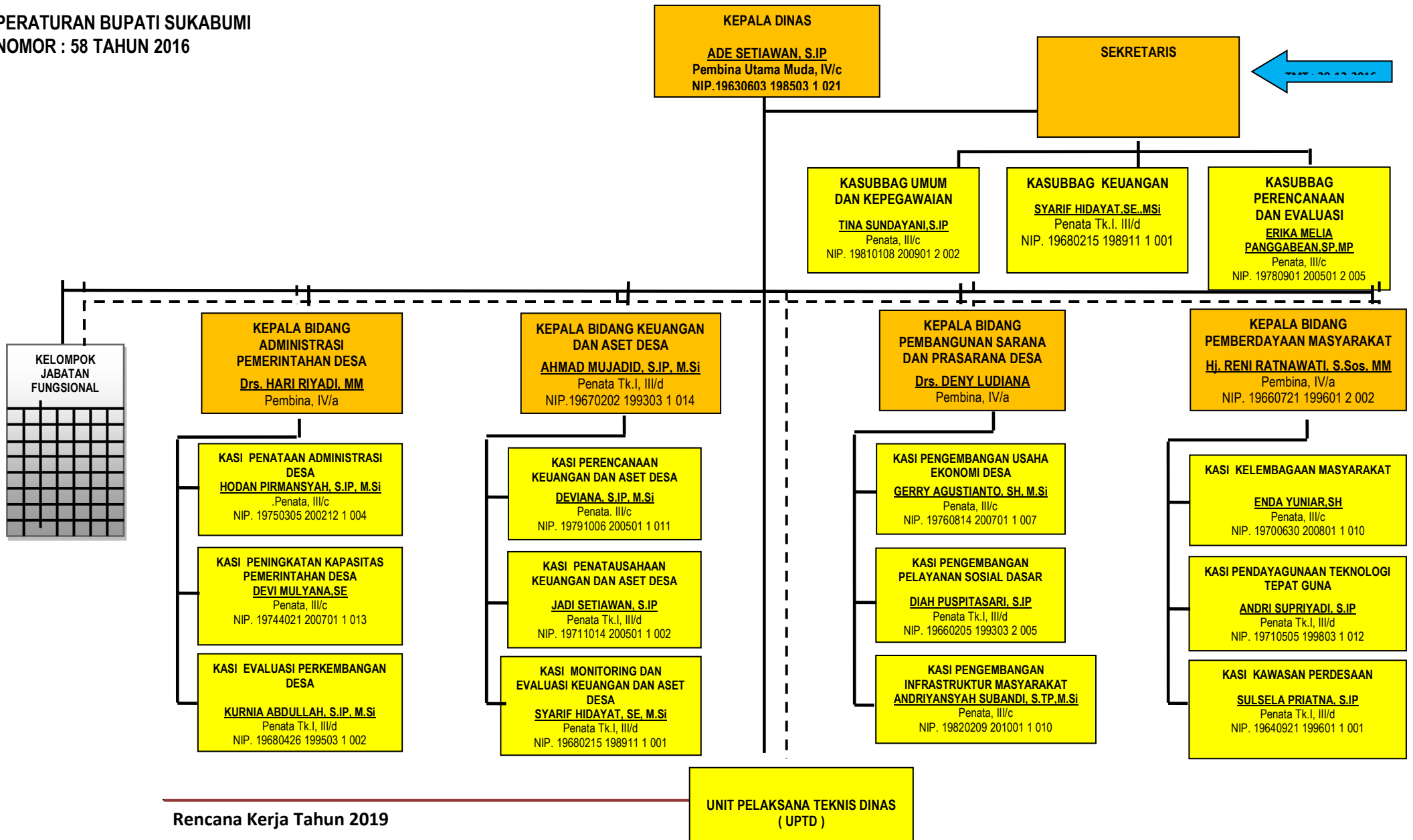
Struktur Organisasi dan uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKABUMI**

DPMD Kabupaten Sukabumi

**PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 58 TAHUN 2016**





2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

DPMD Kabupaten Sukabumi dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tidak besentuhan langsung dengan kebijakan dan program yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) 2016-2020.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Adapun Isue-Isue Strategis yang dihadapi DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

- 1. Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.
- 2. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia; kurangnya sarana dan prasarana kelembagaan; kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan; masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha; belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan; belum optimalnya promosi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Lemahnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam melestarikan hasil kegiatan.



3. **Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal.
4. **Masih adanya Desa yang termasuk kategori Desa tertinggal**, diantaranya dikarenakan oleh belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa; kurangnyakajian terhadap status perkembangan desa; penggalian potensi sumber daya desa yang masih rendah; belum terencananya program pembangunan di desa secara baik; masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah; belum bersinerginya perencanaan pembangunan di Desa; masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa; masih tingginya angka kemiskinan.
5. **Belum Optimalnya Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh bangunan Kantor yang belum representatif; kurangnya sarana dan prasarana kantor; kurangnya Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil; masih kurangnya kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai; Masih rendahnya Pagu Anggaran untuk membiaya tugas dan fungsi; masih perlunya sinergitas program/kegiatan antar bidang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 di bawah ini.





2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019, disamping berpedoman pada Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi serta Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi berpedoman pada Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukabumi dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-2020, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Barat 2013-2019, RKPD Provinsi Jawa Barat 2019; dan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Sukabumi 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, DPMD Kabupaten Sukabumi menentukan tujuan dan sasaran yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan 2016-2021.



1.2.1 Tujuan Renja DPMD

DPMD Kabupaten Sukabumi lebih difokuskan pada pencapaian tujuan, sehingga setiap program yang ada dapat berjalan. Ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai DPMD Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa*; untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa;
 - b. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa;
 - c. Memfasilitasi aksesibilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintah;
 - d. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - e. Melakukan fasilitasi untuk terjalinnya Kerja Sama antar Desa;
 - f. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
2. *Menumbuh kembangkan Ekonomi berbasis Perdesaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*; untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa, melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
 3. Memasilitasi aksibilitas Lembaga DinasUsaha Milik Desa sebagai wadah tempat terintegrasi kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa;
 4. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Ekonomi Tingkat Desa;
 5. Melakukan fasilitasi untuk terjalinnya kerasama antar Desa dalam rangka cakupan Pasar bersama;
 6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses terbentuknya BUMDes serta fasilitasi tersusunnya secara efektif mekanisme dan aturan teknis;



7. Tersusunnya regulasi yang menguatkan keberadaan dan eksistensi Lembaga Ekonomi di Tingkat Desa/Kelurahan.
3. *Terwujudnya Kelembagaan masyarakat yang tangguh dan Meningkatkan Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat Desa;* untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa melalui upaya partisipasi dan komitmen bersama;
 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintahan di Tingkat Desa dalam upaya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan;
 3. Memfasilitasi aksesibilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap potensi SDM dan SDA serta Sumber Daya Kelembagaan;
 4. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Pemerintahan Desa melalui fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 5. Memfasilitasi segala bentuk upaya Pemerintahan Desa terhadap terselenggaranya gerakan gotong-royong dalam Membangun Desa;
 6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

3.2.2 Sasaran Renja DPMD

Sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukabumi, merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan, sasaran ini mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah dan kepastian yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun untuk tahun 2019.

Sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukabumi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur;



4. Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa;
6. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa;
7. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap Pembangunan Daerah dan Nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya Program Pembangunan yang dirancang Pemerintah untuk Pembangunan Desa.

Hampir seluruh Instansi, terutama Pemerintah Daerah mengakomodir Pembangunan Desa dalam Program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa Desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur Pemerintahan Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap Program Pembangunan dari Pemerintah akan selalu bermuara ke Desa.

Meskipun demikian, Pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*centre of excellent*), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.

Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan Program dan Proyek Pembangunan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.



Masyarakat masih dianggap sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan.

Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan Pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders Pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan orientasi seperti ini, tentunya Masyarakat Desa beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi "terbelenggu" dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari implementasi Program Bantuan Desa. Selama ini, justru peranan birokrat Pemerintah yang amat menonjol. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup dikenal luas di Desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari Pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung pada bimbingan dan arahan dari Pemerintah.

Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di Desanya apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka



sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (*owner*) kegiatan pembangunan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan dan mendukung Visi DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas pada Kebijakan Umum Kabupaten Sukabumi. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk bagi usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

Kebijakan Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintahan yang Bersih, Peduli, dan Profesional

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Kebijakan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Kerja Tahun 2019, DPMD Kabupaten Sukabumi menggulir beberapa program yang berkesimbangan dari tahun sebelumnya, program tersebut merupakan salah satu manajemen pembangunan yang bersifat partisipatif yang berbasis kewilayahan, yang bertujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat bekerjasama



membangun desanya melalui beberapa bagian sektor yang menjadi harapan masyarakat.

Adapun tupoksi DPMD untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut yaitu melalui 3 Strategi Kebijakan dan 4 program yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021 yaitu :

Strategi Kebijakan :

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.

Program :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program ini merupakan salah satu bukti nyata dari harapan masyarakat dalam rangka menjawab kelompok sasaran yang sekaligus menciptakan sinergitas DPMD Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat.

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*Good Village Governance*) memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Aparatur yang profesional pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : **Pertama**, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian



yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; **Kedua**, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Aparatur Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penunjang pembangunan Desa memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya apalagi sekarang sudah ada regulasi baru yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aparatur Pemerintahan Desa memiliki beban tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan desa yang cukup besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh kinerja aparatur pemerintahan desa yang professional. Guna meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang efektif dan efisien, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional
2. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik

2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah 'ruh' dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya.

Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Menurunnya Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.



2. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
3. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan merupakan salah satu upaya mendasar dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Potensi sumberdaya di desa yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk eksistensi kelembagaan ekonomi mikro perdesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha dan (4) pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan handal. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Terwujudnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa
2. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa



4. Membangun budaya partisipasi masyarakat

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai penduduk desa diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fenomena permasalahan yang harus segera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam adalah terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Gambaran Rencana Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.1** dibawah ini.





BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi di operasionalkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, yaitu untuk Tahun 2019. Terlaksananya Renja ini sangat ditentukan oleh Partisipasi dan Kesungguhan seluruh Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta dukungan Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang memadai.

Untuk itu perlu adanya Pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam pelaksanaan Renja ini. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada seluruh Aparatur DPMD Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders*, baik Dinas dan Instansi maupun Swasta dan Masyarakat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders* yang membaca Rencana Kerja ini.

Palabuhanratu, 30 Juli 2018

Kepala Dinas,

ADE SETIAWAN, SIP
NIP. 19630603 198503 1 021

**3.1 GAMBARAN RANCANGAN RKPD TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKABUMI**

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan										
															PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya
2 WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																								
2.07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
2.07.17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
2.07.17.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
2.07.17.02.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, Jl.Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi;	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Target: 100 %;	ATK 12bln, Alat listrik 12 bln, perabotan kebersihan 12 bln, bahan pembersih 12 bln, jasa telpon 12 bln, jasa listrik 12 bln, surat kabar 12 bln, jasa kebersihan 12 bln, belanja cetak 12 bln, pengadaan dan perjalanan dinas 12 bln Target: 100 %;	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Target: 100 %;				0	0	1,026,000,000	1,026,000,000			0	0	0	1,026,000,000	1,026,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.12 Program peningkatan Disiplin Aparatur																								
2.07.17.12.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	DPMD - Jl.Bhayangkara Km,1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Meningkatkan disiplin aparatur Target: 100 %;	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Target: 50 paket;	Meningkatnya disiplin aparatour berpakaian Target: 100 %;				0	0	20000000	20000000			0	0	0	20000000	25000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.12.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	DPMD = Jl.Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Meningkatkan disiplin aparatur Target: 100 %;	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu Target: 50 Paket;	Meningkatnya disiplin aparatour berpakaian Target: 100 %;				0	0	49500000	49500000			0	0	0	49500000	52000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								
2.07.17.13.01	Pengembangan Kapasitas Pegawai	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	DPMD - Jl. Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Jumlah pegawai Target: 35 orang;	Jumlah Sumber Daya Aparatur Target: 35 orang;	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Target: 100 %;				0	0	270000000	270000000			0	0	0	270000000	300000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																								

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja									Biaya						Keterangan				
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
															PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
2.07.17.1 6.01	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	DPMD - Jl.Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan realisasi keuangan Target: 100 %;	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD Target: 1 dok;	Meningkatnya Perencanaan Kinerja Target: 100 %;																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.1 6.02	Penyusunan laporan Fasilitas kebijakan	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	DPMD - Jl.Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan realisasi keuangan Target: 100 %;	Jumlah dokumen laporan Fasilitas kebijakan Target: 1 dok;	Tersedianya dokumen laporan fasilitas kebijakan yang tepat waktu Target: 100 %;																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.1 6.03	Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	DPMD - Jl.Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan realisasi keuangan Target: 100 %;	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Target: 1 dok;	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu Target: 100 %;																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
2.07.17.1 7.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, - Jl.Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi;	Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur Target: 100 %;	Jumlah AC yang terpelihara Target: 26 unit;	Meningkatnya kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah Target: 12 bulan;																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.1 7.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	DPMD - Jl.Bhayangkara Km.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	meningkatkan kualitas sarana prasarana aparatur Target: 100 %;	Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Target: 7 dan 14 unit;	Meningkatnya kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah Target: 100 %;																DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
2.07.17.1 7.03	pengadaan Mebelair	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	DPMD - Jl.Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	meningkatkan kualitas sarana prasarana aparatur Target: 100 %;	Jumlah mebeler kantor Target: 1 Paket;	Meningkatkan kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah Target: 100 %;	0	0	200000000	200000000	0	0	0	200000000	230000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.1 7.04	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, - Jl.Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	meningkatkan kualitas sarana prasarana aparatur Target: 100 %;	harus nama dinas stainless, papan nama kantor dinas, papan nama dharmawanita, papan nama korpri, papan nama ruangan kantor stanles, Display LED, Papan bagan struktur organisasi Target: 1 paket;	Meningkatnya kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah Target: 100 %;	0	0	200000000	200000000	0	0	0	200000000	230000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.1 7.05	pengadaan Perangkat Komputer	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	DPMD - Jl.Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi	meningkatkan kualitas sarana prasarana aparatur Target: 100 %;	Jumlah Laptop dan printer Target: 3 dan3 unit;	Meningkatkan kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah Target: 100 %;	0	0	550000000	550000000	0	0	0	550000000	600000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.1 7.06	rehabilitasi/pemeliharaan Gedung kantor	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	DPMD- Jl.Bhayangkara KM.1 Palabuhanratu Kab.Sukabumi	Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur Target: 100 %;	Jumlah Gedung yang di rehab Target: 1 Gedung;	Gedung kantor yang nyaman dan optimalnya kinerja pegawai Target: 100 %;	0	0	1000000000	1000000000	0	0	0	1000000000	1300000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.2 6	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan																								
2.07.17.0 1.03	Bimbingan Teknis usaha Budidaya tanaman	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang mandiri Target: 2 klpk;	Jumlah peserta Bimtek Budidaya tanaman Target: 5 klpk;	Meningkatnya kemampuan peserta dalam Budidaya Tanaman Target: 100 %;	0	0	1000000000	1000000000	0	0	0	1000000000	1300000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
	Bimbingan Teknis Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang berkembang	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah Bumdesa dalam kondisi sehat Target: 10 desa;	Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa Target: 5 desa;	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman peserta dalam Manajemen BUMdesa Target:100 orgng ;	0	0	300,000,000	300,000,000				300,000,000	330,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	baru						

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya							Keterangan						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
															PIK P3K	PIK Sektor	Pagu Indikatif	Jumlah							
2.07.17.01.04	Bimbingan Teknis Usaha industri Kerajinan	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga ekonomi desa yang mandiri Target: 2 klpk;	Jumlah peserta Bimtek usaha industri kerajinan Target: 5 klpk;	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman peserta dalam industri kerajinan Target: ;	0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.01.05	Bimbingan Teknis Usaha Pertanian dan Peternakan	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang mandiri Target: 2 klpk;	Jumlah peserta Bimtek usaha pertanian dan peternakan Target: 5 klpk;	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman peserta dalam usaha pertanian dan peternakan Target: 100 %;	0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
	Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang mandiri Target: 2 klpk;	Jumlah klpk yang dibina Target: 2 klpk;	Meningkatnya keberdayaan lembaga usaha ekonomi desa Target: 100 %;	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
	Bimbingan Teknis perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang mandiri Target: 1 klpk;	Jumlah peserta Bimtek perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Target: 1 klpk;	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman peserta dimulsa ekonomi produktif Target: 100 %;	0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000								
	Pemanfaatan Potensi Lokal Desa	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang mandiri Target: 1 klpk;	Jumlah potensi lokal desa yang dimanfaatkan Target: 1 klpk;	Meningkatnya potensi lokal desa Target: 80 %;	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	75,000,000								
2.07.17.01.06	Dukungan manajemen kerja sama antar desa	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang berkembang	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah Bumdesa dalam kondisi sehat Target: 10 desa;	Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa Target: 5 desa;	Meningkatnya kerjasama antar desa Target: 80 %;	0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.01.07	Pemanfaatan dan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan Target: 2 klpk;	Jumlah desa yang mengikuti Teknologi Tepat Guna (TTG) Target: 5 klpk;	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi tepat guna (TTG) Target: 80 %;	0	0	500000000	500000000	0	0	0	500000000	530000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.01.08	Pembentukan kelembagaan Pos pelayanan teknologi (POSYANTEK)	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan Target: 2 klpk;	Jumlah kelembagaan posyantek TK kecamatan Target: 1 Kec;	Meningkatnya kelembagaan pos pelayanan teknologi di kecamatan Target: 80 %;	0	0	150000000	150000000	0	0	0	150000000	180000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Perkiraan Maju	Keterangan						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
															PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif								Jumlah
2.07.17.01.09	Pengembangan kawasan Pedesaan	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Manajemen BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang berkembang	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kawasan pedesaan yang berkembang Target: 10 desa;	Jumlah kawasan pedesaan Target: 3 kawasan;	Meningkatnya perekonomian mikro pedesaan Target: 80 %;				0	0	500000000	500000000	0	0	0	500000000	530000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.01.10	Pengembangan Pasar Desa	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang berkembang	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah Bumdesa dalam kondisi sehat Target: 10 Desa;	Jumlah Pasar desa yang berkembang Target: 1 Desa;	Meningkatnya pendapatan dan kesempatan usaha Target: 80 %;				0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.01.11	Penguatan Perekonomian Mikro Pedesaan	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang berkembang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, - Jl.Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kec.Palabuhanratu	Jumlah Bumdesa dalam kondisi sehat Target: 10 Desa;	Jumlah Desa yang dibina perekonomian mikronya Target: 2 Desa;	Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan usaha Target: 80 %;				0	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	700,000,000	730,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.01.12	Peningkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan Target: 2 klpk;	Jumlah kelompok yang bermitra dengan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan Target: 1 klpk;	Meningkatnya kesempatan usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan Target: 80 %;				0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.01.13	Peningkatan sarana Prasarana perdagangan	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang berkembang	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah Bumdesa dalam kondisi sehat Target: 10 desa;	Jumlah desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana Target: 1 Desa;	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan Target: 80 %;				0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.01.01.56	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa																								
	Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 orang;	Jumlah aparatur Pemdes yang di Bimtek Target: 200 Orang;	Meningkatnya kemampuan peserta dalam pengelolaan keuangan Desa Target: 100 %;				0	0	50000000	50000000				50000000	53000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
															PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
	Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 orang;	Jumlah aparatur Pemdes yang di Bimtek Target: 200 Orang;	Meningkatnya kemampuan peserta dalam Manajemen Pemerintahan Desa Target: 100 %;				0	0	50000000	50000000				50000000	53000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
	Bimbingan Teknis Administrasi Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 orang;	Jumlah anggota BPD yang di Bimtek Target: 200 Orang;	Meningkatnya kemampuan peserta dalam Administrasi Desa Target: 100 %;						50000000	50000000				50000000	53000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
	Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula dan Ladies Program	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 422orang;	Jumlah Kades Pemula dan Istri kades yang di Bimtek Target: 422 Orang;	Meningkatnya kemampuan teknis Kades Pemula dan Istri Kades Target: 100 %;				0	0	800000000	800000000			0	800000000	850000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.02.03	Bimbingan Teknis BPD	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 orang;	Jumlah anggota BPD yang di Bimtek Target: 200 Orang;	Meningkatnya kemampuan teknis anggota BPD Target: 100 %;				0	0	300000000	300000000			0	300000000	330000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 orang;	Jumlah aparatur desa yang di Bimtek Target: 200 Orang;	Meningkatnya kemampuan aparatur Pemdes Target: 100 %;				0	0	500000000	500000000			0	500000000	530000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.02.04	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan aset desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 Orang;	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan aset desa Target: 70 orang;	Meningkatnya kemampuan peserta dalam penatausahaan keuangan dan aset desa Target: 100 %;				0	0	110000000	110000000			0	110000000	140000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.02.05	Bimbingan Teknis perencanaan keuangan dan aset desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 orang;	Jumlah peserta yang dilatih dalam perencanaan keuangan dan aset desa Target: 100 Orang;	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam perencanaan keuangan dan aset				0	0	160000000	160000000			0	160000000	175000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
															PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
	Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa yang dibina Target: 75 desa;	Jumlah desa yang menerima pembinaan perencanaan keuangan dan aset desa Target: 100 Orang;	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban							0	0	200000000	200000000	0	0	0	200000000	230000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.02.06	Dukungan manajemen Bale sawala Siskeudes	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 desa;	Jumlah desa yang mendapat dukungan manajemen bale sawala siskeudes Target: 381 desa;	Meningkatnya pengelolaan administrasi siskeudes Target: 100 %;							0	0	350000000	350000000	0	0	0	350000000	380000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.02.07	Dukungan penatausahaan keuangan dan Aset Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah desa yang mendapatkan dukungan penatausahaan keuangan dan aset desa Target: 75 desa;	Meningkatnya tertib penatausahaan keuangan dan aset desa Target: 80 %;							0	0	200000000	200000000	0	0	0	200000000	230000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
2.07.17.02.08	Lomba Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa Target: 10 Desa;	Meningkatnya pengelolaan administrasi dan data perkembangan desa dan Kabupaten Target: 80 %;							0	0	450000000	450000000	0	0	0	450000000	480000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah desa yang tertib dalam penyusunan APB Desa Target: 75 Desa;	Meningkatnya pengelolaan administrasi dan APB Desa Target: 80 %;							0	0	150000000	150000000				150000000	180000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru
	Pendataan Asset Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah desa yang tertib dalam penyusunan Aset Desa Target: 75 Desa;	Meningkatnya pengelolaan administrasi dan Aset desa Target: 80 %;							0	0	200000000	200000000				200000000	230000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja									Biaya						Keterangan				
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
2.07.17.02.09	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi APB Desa Target: 75 Desa;	Meningkatnya Pengelolaan administrasi APB desa Target: 80 %;				0	0	150000000	150000000	0	0	0	150000000	180000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.02.10	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, - Jl.Bhayangkara KM.1 Desa	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah Perbup yang disusun Target: 1 Perbup;	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan regulasi desa Target: 80 %;				0	0	50000000	50000000	0	0	0	50000000	80000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang terlatih Target: 200 orang;	Jumlah aparatur Pemesdes yang mengikuti sosialisasi Target: 381 orang;	Meningkatnya kemampuan teknis aparatur desa Target: 100 %;				0	0	350000000	350000000	0	0	0	350000000	380000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
	Pengadaan Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah sarana prasarana entri data profil desa Target: 5 desa;	Data Profil Desa Target: 80 %;				0	0	80,000,000	80,000,000				80,000,000	83,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah Kepala Desa yang terpilih Target: 211 orang;	Jumlah calon Kades yang mengikuti pemilihan Target: 211 desa;	Kepala Desa yang terpilih Target: 100 %;				0	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	21,000,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.02.11	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah peserta yang mengikuti Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Target: 100 orang;	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman peserta dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan				0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.02.12	Profil desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah administrasi desa yang terkelola dengan baik Target: 5 Desa;	Jumlah Profil desa yang terkelola dengan baik Target: 381 desa;	Meningkatnya pengelolaan Profil dan data desa Target: 80 %;				0	0	600000000	600000000	0	0	0	600000000	630000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			
2.07.17.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																								
2.07.17.03.01	Pembangunan gedung baru kantor DPMD kabupaten Sukabumi	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, - Jl.Bhayangkara KM.1 Desa	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah Gedung Kantor Baru DPMD Target: 1 Gedung;	Meningkatnya kenyamanan dan optimalnya kinerja pegawai Target: 80 %;				0	0	0	0	4000000000	0	0	4000000000	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru			

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tenaga Teknis dan Masyarakat	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih Target: 100 orang;	Meningkatnya Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih Target: 80 %;	0	0	250000000	250000000	0	0	0	250000000	275000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
	Bimbingan teknis Administrasi desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih Target: 5 klpk;	Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih Target: 75 orang;	Meningkatnya Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang terlatih Target: 80 %;	0	0	120000000	120000000	0	0	0	120000000	150000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
	Dukungan Manajemen partisipatif	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 kec;	Jumlah Desa yang dibangun perkerasan/pengaspalan jalan Target: 3 kec;	meningkatnya pemberdayaan masyarakat Target: 80 %;	0	0	160000000	160000000	0	0	0	160000000	190000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.02	Pembangunan Jalan Desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah Desa yang dibangun perkerasan/pengaspalan jalan Target: 9 desa;	meningkatnya akses jalan desa Target: 80 %;	0	0	0	0	18000000000	0	0	18000000000	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.03	Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 desa;	Jumlah Desa yang mendapatkan pemberdayaan Target: 2 Desa;	meningkatkan perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar dan pemberdayaan	0	0	430000000	430000000	1400000000	0	0	1830000000	450000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.04	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah lembaga pemberdayaan dan organisasi masyarakat desa Target: 10 klpk;	Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat desa Target: 80 %;	0	0	500000000	500000000	0	0	0	500000000	530000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.05	Pengembangan pelayanan sosial dasar	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah Desa yang menerima Pelayanan Sosial Dasar Target: 5 Desa;	Meningkatnya status dan kesejahteraan Desa Target: 80 %;	0	0	500000000	500000000	0	0	0	500000000	530000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.06	Penguatan kelembagaan masyarakat	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah Kelembagaan kelompok yang dibina Target: 3 klpk;	Meningkatnya pemberdayaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa Target: 80 %;	0	0	200000000	200000000	0	0	0	200000000	230000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.07	Peningkatan efektivitas penyaluran dana desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah desa yang mendapatkan penyaluran dana desa Target: 381 desa;	Meningkatnya efektivitas penyaluran dana desa Target: 100 %;	0	0	820000000	820000000	0	0	0	820000000	850000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
	Pengadaan Sarana Prasarana Desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah desa yang mendapatkan sarana dan prasarana Target: 10 desa;	Meningkatnya efektivitas penyaluran dana desa Target: 100 %;				250000000	250000000				250000000	280000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
2.07.17.03.08	Peningkatan keberdayaan desa-desa perbatasan	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah desa - desa di perbatasan yang mendapatkan keberdayaan Target: 2 Desa;	meningkatnya keberdayaan Desa-desa Perbatasan Target: 100 %;				200000000	200000000				200000000	230000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
2.07.17.03.09	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat (BBGRM)	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Target: 47 Kec;	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Gotong royong Target: 100 %;				300000000	300000000				300000000	330000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
	Penyelenggaraan Pramusrenbang Desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah desa yang mengikuti desiminasi pramusrenbang Desa Target: 381 desa;	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa Target: 100 %;				350000000	350000000				350000000	380000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
2.07.17.03.10	Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi masyarakat Desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah masyarakat yang ikut dalam Desiminasi informasi bagi masyarakat Desa Target: 150 orang;	Meningkatnya pemahaman dan informasi bagi masyarakat Target: 80 %;				350000000	350000000				350000000	380000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
2.07.17.03.11	Program terpadu pemberdayaan masyarakat/PAP GSC	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Target: 11 kegiatan;	Meningkatnya program terpadu pemberdayaan masyarakat/PAP GSC Target: 80 %;				250000000	250000000				250000000	280000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
2.07.17.03.12	Rehab Jalan Desa	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Terlaksananya Rehab Jalan Desa Target: 9 Desa t'tinggal;	Meningkatnya akses jalan desa yang layak dan memadai Target: 80 %;				0	0	18000000000			18000000000	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
2.07.17.03.13	Revitalisasi Posyandu	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD Kabupaten Sukabumi	Jumlah Posyandu dan Kader Target: 47 Kec;	Terseleenggaranya Kegiatan Revitalisasi Posyandu Target: 47 Kec;	meningkatnya kinerja posyandu/kader Target: 100 %;				0	0	15000000000			15000000000	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
	Penguatan Pokjanal Posyandu	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD Kabupaten Sukabumi	Jumlah Posyandu dan Kader Target: 47 Kec;	Terseleenggaranya Kegiatan Pokjanal Posyandu Target: 47 Kec;	meningkatnya kinerja posyandu/kader Target: 100 %;				0	0	500,000,000			500,000,000	530,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
															PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							
2.07.17.03.14	Rumah Tidak Layak huni	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa Target: 5 klpk;	Jumlah Desa yang menerima Rumah layak huni Target: 9 Desa;	Meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Target: 80 %;	0	0	0	0	10000000000	0	0	0	10000000000	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru					
2.07.17.03.15	Sinergitas peran pelaku lembaga masyarakat	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah desa yang dibina dalam peran pelaku lembaga masyarakat Target: 50 Desa;	Meningkatnya sinergitas peran pelaku lembaga masyarakat Target: 80 %;	0	0	150000000	150000000	0	0	0	150000000	180000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.16	SPAM Perdesaan	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	DPMD Kabupaten Sukabumi	Jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat Target: 2 Desa;	Jumlah Desa yang mendapat bantuan MCK dan Air Bersih Target: 9 Desa;	Meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Target: 80 %;	0	0	0	0	9000000000	0	0	9000000000	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.03.17	TMMD,BBGRM TNI	Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah Desa yang berpartisipasi swadaya gotong royong Target: 9 Desa;	Jumlah Desa yang berpartisipasi swadaya gotong royong Target: 9 Desa;	Meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat Target: 80 %;	0	0	0	0	1000000000	0	0	1000000000	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
2.07.17.04	Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan																								
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah desa yang mendapatkan stimulan pembangunan desa Target: 1 Desa;	Meningkatnya kualitas pembangunan Desa Target: 80 %;	0	0	100000000	100000000	0	0	0	100000000	130000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
	Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Provinsi	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan Provinsi Target: 381 Desa;	Meningkatnya efektivitas bantuan provinsi kepada desa Target: 100 %;	0	0	300000000	300000000	0	0	0	300000000	330000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						
	Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi swadaya gotong royong masyarakat dan TNI Target: 2 Desa;	Meningkatnya peran serta partisipasi masyarakat Target: 80 %;	0	0	250000000	250000000	0	0	0	250000000	280000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru						

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja						Biaya						Keterangan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perkiraan Maju	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	PIK P3K	PIK Sektor	Pagu Indikatif	Jumlah							
	Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui TMMD (Banprov)	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi swadaya gotong royong masyarakat dan TNI Target: 5 Desa;	Meningkatnya peran serta partisipasi masyarakat Target: 80 %;			0	0	150000000	150000000	0	0	0	150000000	180000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru				
	Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui BSMSS (Banprov)	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah desa yang berpartisipasi Target: 5 Desa;	Meningkatnya peran serta partisipasi masyarakat Target: 80 %;			0	0	350000000	350000000	0	0	0	350000000	380000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru				
	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah desa yang berpartisipasi Target: 5 Desa;	Meningkatnya peran serta partisipasi masyarakat Target: 80 %;			0	0	350000000	350000000	0	0	0	350000000	380000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru				
	Dukungan Manajemen Partisipatif/ PNPm GSc	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah desa yang mendapat dukungan manajemen PNPm GSC Target: 47 Kec;	Meningkatnya peran serta partisipasi masyarakat Target: 80 %;			0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	1,250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru				
2.07.17.04.01	Pelaksanaan sosialisasi Pra Musrebang desa	Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Seluruh Kabupaten Sukabumi	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Target: 200 Desa;	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam Pramusembang desa Target: 381 Desa;	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa Target: 80 %;			0	0	500000000	500000000	0	0	0	500000000	530000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baru				
TOTAL											0	0	12414500000	12414500000	7640000000	0	0	88814500000	13450000000						

Sukabumi, Desember 2017



ADE SETIAWAN, SIP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19630603 198503 1 021

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Lokasi	Indikator Kerja									Biaya					Perkiraan Maju	Keterangan				
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD Kabupaten				APBD Provinsi		APBN	Sumber Dana Lainnya	Total	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
															PIK P3K	PIK Sektoral	Pagu Indikatif	Jumlah							

3.1 GAMBARAN RANCANGAN RKPD TAHUN 2019
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Deskripsi dan Keyword
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	1,026,000		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	1,026,000	ATK, Alat Listrik, Perabotan Kebersihan dan Bahan Pembersih, jasa Telpn, jasa Listrik, Surat Kabar, Jasa Kebersihan, Belanja cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas	Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	270,000		
					Pengembangan Kapasitas Pegawai	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33 orang	35 orang	270,000	Meningkatkan Kemampuan dan keahlian Aparatur DPMD	Peningkatan Kapasitas
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	100%	1,210,000		
					Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler Kantor	1 pkt	1 pkt	200,000	Segala macam Mbelair Untuk Keperluan kantor DPMD	Mebelair Kantor
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 pkt	1 pkt	200,000	Huruf nama Dinas stainless, papan nama kantor, dinas, papan nama dharmo wanita, papan nama korpri, papan nama ruangan kantor stainless, Display LED, papan bagan struktur organisasi (1 paket, 1 unit, 1 unit, 13 Unit, 1 unit, 1 paket, 2 unit)	peralatan dan perlengkapan
					Pengadaan Perangkat komputer	Tersedianya Perangkat komputer		1 pkt	60,000	Laptop dan Printer	Komputer
					Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Jumlah AC yang terpelihara	26 unit	26 unit	150,000	Pemeliharaan AC secara berkala	Pemeliharaan AC Kantor
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	8 unit	8 unit	450,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional secara berkala	Pemeliharaan Kendaraan
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab/dipelihara	1 gedung	1 gedung	150,000	Rehabilitasi Gedung kantor yang mengalami kerusakan	Pemeliharaan Gedung Kantor
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang disiplin	100%	100%	69,500		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	45 pkt	45 pkt	20,000	Pakaian dinas warna gading beserta perlengkapannya	Pakaian dinas

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								1	2		
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia	45 pkt	45 pkt	48,500	Pakaian yang dipakai pada hari-hari tertentu	Pakaian Khusus
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	2 dok	2 dok	250,000		
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	135,000	Penyediaan Laporan Renja Renstra, RKP Online, RKA, DPA, DPPA, Triwulan, LKJ, LKPJ, LPPD	Laporan capaian kinerja
					Facilitasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 dok	100,000	Menyediakan Dokumen Kepegawaian	Facilitasi Kebijakan
					Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	15,000	Laporan Semesteran, Pronosis, Laporan Tahunan	Laporan Keuangan Dinas
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa	Kompetensi penyelenggara pemerintah Desa	Tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	762 orang	250 orang	4,800,000		
		Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa			Jumlah Administrasi Desa yang dikelola dengan baik	25 desa	5 desa	3,650,000		
					Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	381 orang	200 orang	500,000	Bimtek untuk aparatur Pemerintahan desa agar memahami pengelolaan keuangan desa	Pengelolaan Keuangan Desa
					Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek manajemen Pemdes	-	200 orang	500,000	Bimtek untuk aparatur Pemerintahan desa agar memahami manajemen Pemerintahan desa	Manajemen Pemerintahan Desa
					Bimbingan Teknis Administrasi Desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek Administrasi Desa	-	200 orang	500,000	Bimtek untuk aparatur desa agar memahami administrasi Desa	Administrasi Desa
					Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula dan Ladies Program	Jumlah Kepala Desa dan Istri Kepala Desa yang di Bimtek	-	422 orang	800,000	Bimtek Khusus untuk Kepala desa Pemula yang abru dilantik beserta istrinya	Kepala Desa pemula dan Ladies Program
					Bimbingan Teknis BPD	Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek	-	200 orang	500,000	Bimtek untuk BPD	BPD
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di Terselenggaranya Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa	381 orang	200 orang	500,000	Pembinaan untuk 381 Desa untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
					Profil Desa	Tersedianya data Profil Desa yang up to date	381 Desa	381 Desa	700,000	Pendataan Profil 381 desa	Profil desa
					Pengisian Balas Desa	Veridifikasinya Balas Desa	10 Desa	5 Desa	250,000	Memberikan lantia balas-balas pada setiap desa dengan jelas	Balas Desa
					Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang Undangan	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	5 perbup	1 perbup	100,000	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa	Peraturan Bupati
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Desa	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan desa	381 Desa	381 Desa	350,000	Sosialisasi semua peraturan Perundang-undangan Desa yang berlaku	Sosialisasi Peraturan Desa
					Pengadaan Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel	Tersedianya Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel	30 desa	5 desa	80,000	Pengadaan sarana prasarana untuk entri data profil desa/kel yang sudah didata	Sarana Prasarana
					Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang	381 Desa	211 Desa	20,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa untuk 211 Desa	Pikades

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								1	2		
					Lomba Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	25 Desa	10 Desa	500.000	Lomba desa yang memiliki peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Lomba Desa
					Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)	Jumlah Desa yang terlibat dalam penyusunan APB Desa	381 Desa	75 Desa	150.000	Pembinaan untuk 381 desa dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa	APB Desa
					Pendataan Asset Desa	Tersedianya Data Asset Desa	381 Desa	75 Desa	200.000	Pendataan dan pencatatan aset-aset desa	Aset Desa
					Dukungan Penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	Jumlah Desa yang terlibat dalam penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	381 Desa	75 Desa	200.000	Pembinaan dan penatausahaan keuangan dan aset desa	Keuangan dan Aset Desa
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Tersusunnya Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi APB Desa	381 Desa	75 Desa	150.000	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa	Monitoring dan evaluasi
					Dukungan Manajemen Bale Sawala SISKEUDEDES	Jumlah Desa yang mengelola SISKEUDEDES	381 Desa	381 Desa	350.000	Pembinaan Manajemen Siskeudes untuk 381 desa	Siskeudes
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	47 kec	47 kec	100.000	Pelatihan Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset desa	Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan dan aset desa
					Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih		80 orang	120.000	Bimtek untuk aparat pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan dan aset desa	Keuangan dan Aset Desa
					Bimbingan teknis perencanaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih		100 orang	175.000	Bimtek kepada aparat pemerintah desa dalam perencanaan keuangan dan aset desa	Perencanaan Keuangan dan aset desa
					Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Jumlah Desa yang terlibat dalam pertanggungjawaban Keuangan dan Asset Desa	381 Desa	75 Desa	200.000	Pembinaan kepada aparat pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan Belanja Desa	Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Menurunnya Status Desa Sangat Tertinggal	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	111 desa	2 desa	3,200,000		
	Lembaga kemasyarakatan desa	Tersedianya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat			Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih		100 orang	1,200,000		
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Organisasi Masyarakat			Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	14 klpk	5 klpk	1,450,000		
					Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	111 Desa	2 Desa	1,600,000	Pemberdayaan di desa-desa sangat tertinggal sehingga statusnya meningkat	Pemberdayaan desa sangat tertinggal
					Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	-	100 orang	250,000	Bimtek untuk tenaga teknis dan masyarakat	tenaga teknis dan masyarakat

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								1	2		
					Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Diseminasi Informasi tentang Dana Desa	-	200 orang	450.000	Diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Diseminasi Informasi
					Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana Desa	Jumlah Desa yang menerima Dana Desa	381 Desa	381 Desa	1.100.000	Meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa	Dana Desa
					Pengadaan Sarana Prasarana Desa	Tersedianya Sarana Prasarana Desa	-	10 Unit	250.000	(sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana agama, sarana pemerintahansarana Umum)	sarana dan prasarana desa
					Peningkatan Keberdayaan Desa-Desa Perbatasan	Jumlah Desa-Desa yang meningkat Infrastrukturnya	-	2 Desa	250.000	Peningkatan Infrastrukturu desa- desa perbatasan	Desa-desa perbatasan
					Penyusunan Rancangan Perbup Dana Desa dan alokasi dana desa	Tersusunnya Revisi Perda Tentang Dana	-	1 perda	80.000	Revisi Perbup tentang dana desa	Perbup dana Desa
					Bimbingan teknis Administrasi desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	-	75 orang	120.000	Bimtek tentang administrasi desa (administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan permusyawaratan desa)	Administrasi desa
					Dukungan Manajemen partisipatif	Workshop pemberdayaan masyarakat	-	100 orang	160.000	Workshop pemberdayaan masyarakat (mendorong semua unsur masyarakat bergabung dan bekerja sama untuk kemajuan desa)	Pemberdayaan masyarakat
					Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS	Terfasiliasinya koordinasi antara TNI, Pemuda dan masyarakat	-	3 Kec	700.000	pembangunan sarana jalan di Desa, Pembangunan Taman Pengajian Qur'an (TPQ), perluasan masjid dan pembuatan saluran drainase juga menjadi sasaran fisik kegiatan TMMD .Untuk sasaran non fisik berupa sosialisasi maupun pembinaan kepada warga.	TMMD (TNI manunggal membangun desa) dan BSMSS(bakti sosial manunggal satata sariksa)
					Penyelenggaraan bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)	Penilaian, pencanangan BBGRM Kabupaten, Provinsi dan Nasional	-	47 Kec	300.000	(1) Gotong royong dibidang kemasyarakatan, (2) Gotong royong dibidang ekonomi, (3) Gotong royong dibidang sosial budaya dan agama, (4) Gotong royong dibidang lingkungan	BBGRM
					Penyelenggaraan Pra Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Desiminasi pramusrebang Desa	-	381 Desa	350.000	Pramusrebang yang dihadiri 381 desa	Pramusrebang desa
					Program Terpadu pemberdayaan Masyarakat/PAP PNPm GSC	Terlaksananya kegiatan Program terpadu Pemberdayaan masyarakat	-	11 Kegiatan	250.000	Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan guna mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) dibidang pendidikan dan kesehatan.	PAP PNPm GSC
					Pembangunan Gedung Baru Kantor DPMD Kabupaten Sukabumi	Terbangunnya Gedung Baru DPMD Kab. Sukabumi	-	1 gedung	-	Pembangunan Gedung Baru kantor DPMD	Pembangunan Gedung Kantor

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								1	2		
					Pembangunan/ Rehab Kantor Desa	Jumlah Kantor Desa yang terbangun	30 Desa	2 Desa	250,000	Pembangunan/rehabilitasi gedung akantor desa yang rusak	Rehab kantor desa
					Sinergitas Peran Pelaku Lembaga Masyarakat	Cakupan Sinergitas antara Peran Pelaku Lembaga Masyarakat Desa	-	50 Desa	200,000	adanya sinergitas diantara peran pelaku-pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, produsen/perusahaan,pemerintah lembaga keuangan,dan masyarakat dunia)	Sinergitas peran pelaku ekonomi
					Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang berdaya	-	10 klpk	500,000	kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan lembaga dan organisasi masyarakat desa	Pemberdayaan
					Penguatan Pokjanal Posyandu	Jumlah Peningkatan Kapasitas Posyandu desa	-	47 Posyandu	500,000	Membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan kepada Posyandu dibidang KIA, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan, serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan.	Pokjanal Posyandu
					Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah Desa yang meningkat Pelayanan Sosial Dasarnya	-	5 Desa	500,000	pengembangan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sosial yaitu kaitan dengan pelayanan dasar seperti, Administrasi, Kesehatan dan Pendidikan,"	Pelayanan Sosial dasar
					Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Menguatnya Kelembagaan Masyarakat	-	3 klpk	250,000	adalah sekumpulan tindakan – tindakan yang dikembangkan agar warga masyarakat dapat mengatasi masalah sosialnya atau semua bentuk investasi sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan perorangan dan masyarakat secara keseluruhan.	Kelembagaan Masyarakat
Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan	Kemandirian Ekonomi Mikro pedesaan	Terwujudnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDesa yang berkembang	381 desa	10 desa	1,300,000		
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa			Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	-	2 klpk	1,750,000		
					Bimbingan Teknis usaha budidaya tanaman	Jumlah Kelompok yang dilatih Budidaya tanaman	-	5 Klpk	100,000	Bimtek usaha budidaya tanaman untuk masyarakat desa	Budidaya tanaman
					Bimbingan Teknis Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesa yang dilatih	-	100 orang	300,000	Bimtek manajemen Badan usaha milik desa	Bumdes
					Bimbingan Teknis Usaha Industri Kerajinan	Jumlah Kelompok yang dilatih Industri Kerajinan	-	5 Klpk	100,000	Bimtek usaha industri kerajinan untuk masyarakat desa	Indutri kerajinan
					Bimbingan Teknis Usaha Pertanian dan Peternakan	Jumlah Kelompok yang dilatih	-	5 Klpk	100,000	Bimtek usaha pertanian dan peternakan untuk masyarakat desa	peternakan dan pelemakan desa

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								1	2		
					Peningkatan pemodaln bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	diberikan stimulan modal	-	2 Klpk	50,000	Pemberian pemodaln bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	permodalan ussaha mikro
					Peningkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah Kelompok yang bermitra	-	1 Klpk	100,000	(1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.	kemitraan swasta dan UMKM
					Bimbingan Teknis perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah peserta yang dilatih usaha ekonomi produktif	-	50 orang	100,000	Bimtek dalam bidang usaha ekonomi produktif untuk perempuan pedesaan yang bertujuan 1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan; 3) Mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi lokal; 4) Meningkatkan pendapatan; 5) Meningkatkan kelahanan pangan dan mengembangkan stok pangan lokal (Cadangan Pangan).	pemberdayaan perempuan
					Pemanfaatan Potensi Lokal Desa	Jumlah Kelompok yang dibina	-	1 Klpk	50,000	pembinaan kelompok untuk memanfaatkanpotensi lokal desa	potensi lokal desa
					Pembentukan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Jumlah Pembentukan Kelembagaan POSYANTEK di TK Kecamatan	5 Kec	1 Kec	150,000	Pembentukan kelembagaan pos pelayanan teknologi di tingkat kecamatan	Posyantek

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								1	2		
					Pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Gelar TTTG	15 Kipk	5 Kipk	500.000	pemanfaatan Gelar teknologi tepat guna merupakan pameran hasil pemikiran atau rekayasa manusia kelompok sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental umat manusia. Dalam kaitan ini teknologi dapat berupa berbagai macam bentuk, antara lain: Alat-alat, Permesinan, Proses, Keterampilan, Pengetahuan dll	Gelar Teknologi Tepat Guna
					Penguatan Perekonomian Mikro Pedesaan	Jumlah Desa yang dilina perekonomian mikronya	381 Desa	100 Desa	700.000	Pembinaan untuk menguatkan perekonomian mikro pedesaan	Perekonomian mikro pedesaan
					Pengembangan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang berkembang	23 Desa	1 Desa	100.000	untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pasar Desa dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian di desa, yakni melalui pemberdayaan pengelolaan pasar desa serta pembangunan dan pengembangan sarana/ prasarana fisik pasar desa	pasar desa
					Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Desa yang mendapat bantuan Sarana Prasarana Perdagangan	-	1 Desa	100.000	bantuan yang ditujukan untuk peningkatan sarana Pasar Tradisional, Pasar Lokal, Pasar Regional, Pasar Swalayan, Hipermarket dan Pasar Grosir.	sarana dan prasarana perdagangan
					Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang berkembang	-	1 Kawasan	500.000	pengembangan kawasan yang kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam degan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi	kawasan perdesaan
					Dukungan Manajemen Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama	-	5 Desa	100.000	pembinaan kerja sama antara desa dalam hal manajemen	kerjasama antara desa
Membangun budaya partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat	Terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	200 kipk	200	3.000.000		
					Pelaksanaan Sosialisasi Pra Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Musrenbangdes	381 desa	381 desa	550.000	sosialisasi pramusrenbang kepada 381 desa	sosialisasi pramusrenbang desa

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								1	2		
					Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa yang mendapatkan stimulan pembangunan desa	-	1 desa	100.000	membantu sendi-sendi ekonomi yang bergerak dalam kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat. Dalam peluncuran Dana tersebut, diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan terukur. Perencanaan tersebut dimulai dari penentuan lokasi-lokasi Desa yang memenuhi kriteria sebagai penerima dana.	stimulan pembangunan desa
					Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Provinsi	Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Provinsi	381 Desa	381 Desa	300.000	meningkatkan efektivitas Bantuan dari Provinsi untuk desa	efektivitas bantuan provinsi
					Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMS	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	10 desa	2 Desa	250.000	meningkatkan peran serta yang berpartisipasi swadaya dalam kegiatan TMMD dan BSMS Bantuan Provinsi	TMMD dan BSMS
					Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui TMMD (Banprov)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	5 desa	1 Desa	150.000	meningkatkan peran serta yang berpartisipasi swadaya dalam kegiatan TMMD Bantuan Provinsi	peranserta masyarakat dalam TMMD
					Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui BSMS (Banprov)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	5 desa	1 Desa	100.000	meningkatkan peran serta yang berpartisipasi swadaya dalam kegiatan BSMS bantuan Provinsi	Peranserta masyarakat dalam BSMS
					Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Gotong-royong	5 desa	100%	350.000	(1) Gotong royong dibidang kemasyarakatan, (2) Gotong royong dibidang ekonomi, (3) Gotong royong dibidang sosial budaya dan agama, (4) Gotong royong dibidang lingkungan	BBGRM
					Dukungan Manajemen Partisipatif/ PNPB GSC	Jumlah Desa yang terkelola	47 Kec	47 Kec	1.200.000	pemberdayaan masyarakat (mendorong semua unsur masyarakat bergabung dan bekerja sama untuk kemajuan desa)	manajemen partisipatif

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Deskripsi dan Keyword
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	1,026,000		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	1,026,000	ATK, Alat Listrik, Perabotan Kebersihan dan Bahan Pembersih, jasa Telpon, jasa Listrik, Surat Kabar, Jasa Kebersihan, Belanja cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas	Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	270,000		
					Pengembangan Kapasitas Pegawai	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33 orang	35 orang	270,000	Meningkatkan Kemampuan dan keahlian Aparatur DPMD	Peningkatan Kapasitas
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	100%	1,210,000		
					Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler Kantor	1 pkt	1 pkt	200,000	Segala macam Mbelair Untuk Keperluan kantor DPMD	Mebelair Kantor
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 pkt	1 pkt	200,000	Huruf nama Dinas stainless, papan nama kantor, dinas, papan nama dharma wanita, papan nama korpri, papan nama ruangan kantor stainless, Display LED, papan bagan struktur organisasi (i paket, 1 unit, 1 unit, 13 Unit, 1 unit, 1 paket, 2 unit)	peralatan dan perlengkapan
					Pengadaan Perangkat komputer	Tersedianya Perangkat komputer		1 pkt	60,000	Laptop dan Printer	Komputer
					Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Jumlah AC yang terpelihara	26 unit	26 unit	150,000	Pemeliharaan AC secara berkala	Pemeliharaan AC Kantor
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	8 unit	8 unit	450,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional secara berkala	Pemeliharaan Kendaraan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab/dipelihara	1 gedung	1 gedung	150,000	Rehabilitasi Gedung kantor yang mengalami kerusakan	Pemeliharaan Gedung Kantor
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Tingkat Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang disiplin	100%	100%	69,500		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	45 pkt	45 pkt	20,000	Pakaian dinas warna gading beserta perlengkapannya	Pakaian dinas
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia	45 pkt	45 pkt	49,500	Pakaian yang dipakai pada hari-hari tertentu	Pakaian Khusus
Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi	Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	2 dok	2 dok	250,000		
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	135,000	Penyediaan Laporan Renja Renstra, RKPD Online, RKA, DPA, DPPA, Triwulan, LKJ, LKPJ, LPPD	Laporan capaian kinerja
					Fasilitasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 dok	100,000	Menyediakan Dokumen Kepegawaian	Fasilitasi Kebijakan
					Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	15,000	Laporan Semesteran, Pronosis, Laporan Tahunan	Laporan Keuangan Dinas
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa	Kompetensi penyelenggara pemerintah Desa	Tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih	762 orang	250 orang	4,800,000		
		Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa			Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik	25 desa	5 desa	3,650,000		
					Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	381 orang	200 orang	500,000	Bimtek untuk aparatur Pemerintahan desa agar memahami pengelolaan keuangan desa	Pengelolaan Keuangan Desa
					Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek manajemen Pemdes	-	200 orang	500,000	Bimtek untuk aparatur Pemerintahan desa agar memahami manajemen Pemerintahan desa	Manajemen Pemerintahan Desa
					Bimbingan Teknis Administrasi Desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek Administrasi Desa	-	200 orang	500,000	Bimtek untuk aparatur desa agar memahami administrasi Desa	Administrasi Desa
					Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula dan Ladies Program	Jumlah Kepala Desa dan Istri Kepala Desa yang di Bimtek	-	422 orang	800,000	Bimtek Khusus untuk Kepala desa Pemula yang abru dilantik beserta istrinya	Kepala Desa pemula dan Ladies Program
					Bimbingan Teknis BPD	Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek	-	200 orang	500,000	Bimtek untuk BPD	BPD
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah aparatur Pemdes yg di bina dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	381 orang	200 orang	500,000	Pembinaan untuk 381 Desa untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Profil Desa	Tersedianya data Profil Desa yang up to date	381 Desa	381 Desa	700.000	Pendataan Profil 381 desa	Profil desa
					Penegasan Batas Desa	Teridentifikasinya Batas Desa	10 Desa	5 Desa	250.000	Memberikan tanda batas-batas pada setiap desa dengan jelas	Batas Desa
					Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati	5 perbup	1 perbup	100.000	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa	Peraturan Bupati
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan desa	381 Desa	381 Desa	350.000	Sosialisasi semua peraturan Perundang-undangan Desa yang berlaku	Sosialisasi Peraturan Desa
					Pengadaan Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel	Tersedianya Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel	30 desa	5 desa	80.000	Pengadaan sarana prasarana untuk entri data profil desa/kel yang sudah didata	Sarana Prasarana
					Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak bergalombang	381 Desa	211 Desa	20.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa untuk 211 Desa	Pikades
					Lomba Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Perlombaan Desa	25 Desa	10 Desa	500.000	Lomba desa yang memiliki peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Lomba Desa
					Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)	Jumlah Desa yang tertib dalam penyusunan APB Desa	381 Desa	75 Desa	150.000	Pembinaan untuk 381 desa dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa	APB Desa
					Pendataan Asset Desa	Tersedianya Data Asset Desa	381 Desa	75 Desa	200.000	Pendataan dan pencatatan aset-aset desa	Aset Desa
					Dukungan Penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	Jumlah Desa yang tertib dalam penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	381 Desa	75 Desa	200.000	Pembinaan dan penatausahaan keuangan dan aset desa	Keuangan dan Aset Desa
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Tersusunnya Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi APB Desa	381 Desa	75 Desa	150.000	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa	Monitoring dan evaluasi
					Dukungan Manajemen Bale Sawala SISKEUDEDES	Jumlah Desa yang mengelola SISKEUDEDES	381 Desa	381 Desa	350.000	Pembinaan Manajemen Siskeudes untuk 381 desa	Siskeudes
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	47 kec	47 kec	100.000	Pelatihan Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset desa	Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan dan aset desa
					Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih		80 orang	120.000	Bimtek untuk aparatur pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan dan aset desa	Keuangan dan Aset Desa
					Bimbingan teknis perencanaan keuangan dan aset desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih		100 orang	175.000	Bimtek kepada aparatur pemerintah desa dalam perencanaan keuangan dan aset desa	Perencanaan Keuangan dan aset desa

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Jumlah Desa yang tertib dalam pertanggungjawaban Keuangan dan Asset Desa	381 Desa	75 Desa	200,000	Pembinaan kepada aparat pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan Belanja Desa	Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Menurunnya Status Desa Sangat Tertinggal	Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	111 desa	2 desa	3,200,000		
	Lembaga kemasyarakatan desa	Tersedianya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat			Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih		100 orang	1,200,000		
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat			Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	14 klkp	5 klkp	1,450,000		
					Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	111 Desa	2 Desa	1,600,000	Pemberdayaan di desa- desa sangat tertinggal sehingga statusnya meningkat	Pemberdayaan desa sangat tertinggal
					Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih	-	100 orang	250,000	Bimtek untuk tenaga teknis dan masyarakat	tenaga teknis dan masyarakat
					Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Masyarakat yang ikut Diseminasi Informasi tentang Desa	-	200 orang	450,000	Diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Diseminasi Informasi
					Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana Desa	Jumlah Desa yang menerima Dana Desa	381 Desa	381 Desa	1,100,000	Meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa	Dana Desa
					Pengadaan Sarana Prasarana Desa	Tersedianya Sarana Prasarana Desa	-	10 Unit	250,000	(sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana agama, sarana pemerintahansarana Umum)	sarana dan prasarana desa
					Peningkatan Keberdayaan Desa-Desa Perbatasan	Jumlah Desa-Desa yang meningkatkan Infrastrukturnya	-	2 Desa	250,000	Peningkatan Infrastrukturu desa- desa perbatasan	Desa-desa perbatasan
					Penyusunan Rancangan Perbup Dana Desa dan alokasi dana desa	Tersusunnya Revisi Perda Tentang Desa		1 perda	60,000	Revisi Perbup tentang dana desa	Perbup dana Desa
					Bimbingan teknis Administrasi desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih		75 orang	120,000	Bimtek tentang administrasi desa (administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan permusyawaratan desa)	Administrasi desa

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword	
								target	Rp. (000)			
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Dukungan Manajemen partisipatif	workshop pemberdayaan masyarakat		100 orang	160.000	workshop pemberdayaan masyarakat (mendorong semua unsur masyarakat bergabung dan bekerja sama untuk kemajuan desa)	Pemberdayaan masyarakat	
					Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS	Terfasilitasinya koordinasi antara TNI, Pemuda dan masyarakat		3 Kec	700.000	pembangunan sarana jalan di Desa, Pembangunan Taman Pengajian Qur'an (TPQ), perluasan masjid dan pembuatan saluran drainase juga menjadi sasaran fisik kegiatan TMMD. Untuk sasaran non fisik berupa sosialisasi maupun pembinaan kepada warga.	TMMD (TNI manunggal membangun desa) dan BSMSS(bakti sosial manunggal salata sariksa)	
					Penyelenggaraan bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)	Penilaian, pencanangan BBGRM Kabupaten, Provinsi dan Nasional		47 Kec	300.000	(1) Gotong royong dibidang kemasyarakatan, (2) Gotong royong dibidang ekonomi, (3) Gotong royong dibidang sosial budaya dan agama, (4) Gotong royong dibidang lingkungan	BBGRM	
					Penyelenggaraan Pra Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Desiminasi pramusrenbang Desa		381 Desa	350.000	Pramusrenbang yang dihadiri 381 desa	Pramusrenbang deea	
					Program Terpadu pemberdayaan Masyarakat/PAP PNPm GSC	Terlaksananya kegiatan Program terpadu Pemberdayaan masyarakat		11 Kegiatan	250.000	Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) merupakan salah satu progam pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan guna mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) dibidang pendidikan dan kesehatan.	PAP PNPm GSC	
					Pembangunan Gedung Baru Kantor DPMD Kabupaten Sukabumi	Terbangunya Gedung Baru DPMD Kab. Sukabumi		1 gedung	-	Pembangunan Gedung Baru kantor DPMD	Pembangunan Gedung Kantor	
					Pembangunan/ Rehab Kantor Desa	Jumlah Kantor Desa yang terbangun		30 Desa	2 Desa	250.000	Pembangunan/rehabilitasi gedung akntor desa yang rusak	Rehab kantor desa
					Sinergitas Peran Pelaku Lembaga Masyarakat	Cakupan Sinergitas antara Peran Pelaku Lembaga Masyarakat Desa		-	50 Desa	200.000	adanya sinergitas diantara peran pelaku-pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, produsen/perusahaan pemerintah lembaga keuangan, dan masyarakat dunia)	Sinergitas peran pelaku ekonomi
					Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang berdaya		-	10 klpk	500.000	kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan lembaga dan organisasi masyarakat desa	Pemberdayaan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penguatan Pokjanal Posyandu	Jumlah Peningkatan Kapasitas Posyandu desa	-	47 Posyandu	500,000	Membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan kepada Posyandu dibidang KIA, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan, serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan.	Pokjanal Posyandu
					Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah Desa yang meningkatkan Pelayanan Sosial Dasarnya	-	5 Desa	500,000	pengembangan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sosial yaitu kaitan dengan pelayanan dasar seperti, Administrasi, Kesehatan dan Pendidikan,"	Pelayanan Sosial dasar
					Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Menguatnya Kelembagaan Masyarakat	-	3 klpk	250,000	adalah sekumpulan tindakan – tindakan yang dikembangkan agar warga masyarakat dapat mengatasi masalah sosialnya atau semua bentuk investasi sosial yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan perorangan dan masyarakat secara keseluruhan.	Kelembagaan Masyarakat
Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan	Kemandirian Ekonomi Mikro pedesaan	Terwujudnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDesa yang berkembang	381 desa	10 desa	1,300,000		
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa			Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri		2 klpk	1,750,000		
					Bimbingan Teknis usaha budidaya tanaman	Jumlah Kelompok yang dilatih Budidaya tanaman	-	5 Klpk	100,000	Bimtek usaha budidaya tanaman untuk masyarakat desa	Budidaya tanaman
					Bimbingan Teknis Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesa yang dilatih	-	100 orang	300,000	Bimtek manajemen Badan usaha milik desa	Bumdes
					Bimbingan Teknis Usaha Industri Kerajinan	Jumlah Kelompok yang dilatih Industri Kerajinan	-	5 Klpk	100,000	Bimtek usaha industri kerajinan untuk masyarakat desa	Indutri kerajinan
					Bimbingan Teknis Usaha Pertanian dan Peternakan	Jumlah Kelompok yang dilatih	-	5 Klpk	100,000	Bimtek usaha pertanian dan peternakan untuk masyarakat desa	peternakan dan peternakan
					Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Jumlah Kelompok yang diberikan stimulan modal	-	2 Klpk	50,000	Pemberian permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	permodalan usaha mikro

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah Kelompok yang bermitra	-	1 Klpk	100,000	(1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.	kemitraan swasta dan UMKM
					Bimbingan Teknis perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah peserta yang dilatih usaha ekonomi produktif	-	50 orang	100,000	Bimtek dalam bidang usaha ekonomi produktif untuk perempuan pedesaan yang bertujuan 1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan; 3) Mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi lokal; 4) Meningkatkan pendapatan; 5) Meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan stok pangan lokal (Cadangan Pangan).	pemberdayaan perempuan
					Pemanfaatan Potensi Lokal Desa	Jumlah Kelompok yang dibina	-	1 Klpk	50,000	pembinaan kelompok untuk memanfaatkan potensi lokal desa	potensi lokal desa

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Deskripsi	Keyword
								target	Rp. (000)		
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembentukan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Jumlah Pembentukan Kelembagaan POSYANTEK di TK Kecamatan	5 Kec	1 Kec	150,000	Pembentukan kelembagaan pos pelayanan teknologi di tingkat kecamatan	Posyanlek
					Pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang mengikuti Gelar TTG	15 Kipk	5 Kipk	500,000	pemanfaatan Gelar teknologi tepat guna merupakan pameran hasil pemikiran atau rekayasa manusia kelompok sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental umat manusia. Dalam kaitan ini teknologi dapat berupa berbagai macam bentuk, antara lain: Alat-alat, Permesinan, Proses, Keterampilan, Pengetahuan dll	Gelar Teknologi Tepat Guna
					Penguatan Perekonomian Mikro Pedesaan	Jumlah Desa yang dibina perekonomian mikroanya	381 Desa	100 Desa	700,000	Pembinaan untuk menguatkan perekonomian mikro pedesaan	Perekonomian mikro pedesaan
					Pengembangan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang berkembang	23 Desa	1 Desa	100,000	untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pasar Desa dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian di desa, yakni melalui pemberdayaan pengelolaan pasar desa serta pembangunan dan pengembangan sarana/ prasarana fisik pasar desa	pasar desa
					Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Desa yang mendapat bantuan Sarana Prasarana Perdagangan	-	1 Desa	100,000	bantuan yang ditujukan untuk peningkatan sarana Pasar Tradisional, Pasar Lokal, Pasar Regional, Pasar Swalayan, Hipermarket dan Pasar Grosir.	sarana dan prasarana perdagangan
					Pengembangan Kawasan Pedesaan	Jumlah Kawasan Pedesaan yang berkembang	-	1 Kawasan	500,000	pengembangan kawasan yang kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi	kawasan pedesaan
					Dukungan Manajemen Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama	-	5 Desa	100,000	pembinaan kerja sama antara desa dalam hal manajemen	kerjasama antara desa

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Deskripsi	Keyword	
							Tahun 2019				
							target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Membangun budaya partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat	Terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	200 klpk	200	3,000,000		
					Pelaksanaan Sosialisasi Pra Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Musrenbangdes	381 desa	381 desa	550,000	sosialisasi pramusrebang kepada 381 desa	sosialisasi pramusrebang desa
					Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa yang mendapatkan stimulan pembangunan desa	-	1 desa	100,000	membantu sendi-sendi ekonomi yang bergerak dalam kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat. Dalam peluncuran Dana tersebut, diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan terukur. Perencanaan tersebut dimulai dari penentuan lokasi-lokasi Desa yang memenuhi kriteria sebagai penerima dana.	stimulan pembangunan desa
					Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Provinsi	Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Provinsi	381 Desa	381 Desa	300,000	meningkatkan efektivitas Bantuan dari Provinsi untuk desa	efektivitas bantuan provinsi
					Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	10 desa	2 Desa	250,000	meningkatkan peran serta yang berpartisipasi swadaya dalam kegiatan TMMD dan BSMSS Bantuan Provinsi	TMMD dan BSMSS
					Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui TMMD (Banprov)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	5 desa	1 Desa	150,000	meningkatkan peran serta yang berpartisipasi swadaya dalam kegiatan TMMD Bantuan Provinsi	peranserta masyarakat dalam TMMD
					Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui BSMSS (Banprov)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong-royong Masyarakat dengan TNI	5 desa	1 Desa	100,000	meningkatkan peran serta yang berpartisipasi swadaya dalam kegiatan BSMSS bantuan Provinsi	Peranserta masyarakat dalam BSMSS
					Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Gotong-royong	5 desa	100%	350,000	(1) Gotong royong dibidang kemasyarakatan, (2) Gotong royong dibidang ekonomi, (3) Gotong royong dibidang sosial budaya dan agama, (4) Gotong royong dibidang lingkungan	BBGRM
					Dukungan Manajemen Partisipatif/ PNPM GSc	Jumlah Desa yang dikelola	47 Kec	47 Kec	1,200,000	pemberdayaan masyarakat (mendorong semua unsur masyarakat bergabung dan bekerja sama untuk kemajuan desa)	manajemen partisipatif



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi di operasionalkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, yaitu untuk Tahun 2019. Terlaksananya Renja ini sangat ditentukan oleh Partisipasi dan Kesungguhan seluruh Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta dukungan Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang memadai.

Untuk itu perlu adanya Pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam pelaksanaan Renja ini. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada seluruh Aparatur DPMD Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders*, baik Dinas dan Instansi maupun Swasta dan Masyarakat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders* yang membaca Rencana Kerja ini.

Palabuhanratu, 30 Juli 2018

Kepala Dinas,

ADE SETIAWAN, SIP
NIP. 19630603 198503 1 021